

ABSTRAK

Griffa Gifta Jannah: Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Sebagian Pekerjaan Dihubungkan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri)

Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan dari PT. Cahaya Terang Abadi Abadi kepada UD Utama Mandiri. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan harus dilakukan secara tertulis, akan tetapi pada kenyataannya perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan ini terjadi dalam bentuk tidak tertulis, yaitu secara lisan, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri, dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kendala pada pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri.

Penelitian ini bertumpu pada teori kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Hal ini berkaitan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada ketidaksesuaian antara teori hukum (*das sollen*), yaitu perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan harus dilakukan secara tertulis dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kenyataan yang terdapat di tempat penelitian (*das sein*), yaitu perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan dilakukan secara lisan.

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri dilakukan dengan cara perjanjian lisan, yang mana tidak melaksanakan amanah pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kendala pada pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri diakibatkan karena Akta AD/ART dan Akta RUPS hanya dimiliki oleh pihak PT. Cahaya Terang Abadi Abadi, sedangkan pihak UD Utama Mandiri tidak memiliki Akta AD/ART dan Akta RUPS, hanya memiliki SIUP, sehingga pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan tidak dilaporkan dan hanya berbentuk lisan. Upaya untuk menanggulunginya maka pihak UD Utama Mandiri wajib membuat Akta AD/ART dan Akta RUPS sesuai amanah yang tercantum dalam perundang-undangan agar perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan dapat dilakukan secara tertulis.